

**ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa
Tengah Periode 2017-2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah**



Oleh:

**MUHAMMAD NURUL HUDA
NIM 13.22.3.1.149**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2018**

**ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa
Tengah Periode 2017-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Muhammad Nurul Huda
NIM 13.22.3.1.149

Surakarta, 24 Juli 2018

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I
NIP 19870828 201403 1 002

**ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa
Tengah Periode 2017-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

Muhammad Nurul Huda
NIM 13.22.3.1.149

Surakarta, 24 Juli 2018

Disetujui dan disahkan oleh:
Biro Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I
NIP 19870828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD NURUL HUDA
NIM : 13.22.3.1.149
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2017-2019)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Juli 2018



Muhammad Nurul Huda

NOTA DINAS

Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdra : Muhammad Nurul Huda

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Nurul Huda NIM: 12.33.1.1.149 yang berjudul:

ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2017-2019)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Juli 2018
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I
NIP. 19870828 201403 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode
2017-2019)**

Oleh:

MUHAMMAD NURUL HUDA
NIM. 13.223.1.149

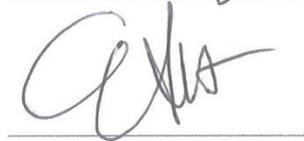
Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi
Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 M/ 11 Dzulhijjah 1439 H dan
dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

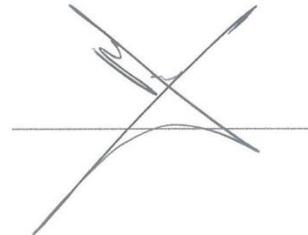
Penguji 1 (Merangkap Ketua Sidang)
H. Dwi Condro Triono, S.P., M.Ag., Ph.D
NIP 19670208 200003 1 001



Penguji 2
Waluyo, Lc., M.A
NIP 19790910 201101 1 005



Penguji 3
M. Endy Saputro, S.Th.I., M.A
NIP 19800905 201503 1 003



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta



Drs. H. Sri Walyoto, M.M., Ph.D
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO

Nuun, demi kalam dan apa yang mereka tulis (Q.S. Al-Qalam Ayat 1).

Puncak dari segala ilmu bukan terletak pada akal tetapi terletak pada hati dan etika, semakin seseorang berilmu semakin dapat memanusiakan manusia.

Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh Pemuda (Tan Malaka).

Tidak peduli seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah misi yang mulia, yang terpenting adalah berkomitmen menyelesaikannya dengan rasa penuh tanggungjawab.

Tidak ada keadaan yang lebih baik atau lebih buruk, yang ada adalah keadaan yang terbaik menurut Allah SWT.

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain (Hadits Riwayat Ath-Thabrani).

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri..... (Q.S. Al-Isra' Ayat 7).

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad Ayat 7).

Menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kamu bisa berencana menikahi siapa, tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa. (Sujiwo Tejo).

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas segala anugerah, rahmah, dan hidayah-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai persembahan karya untuk:

Ayah, Ibu, dan Adik-adik yang senantiasa mengiringi langkah Saya dengan penuh doa dan dukungan yang tiada hentinya.

Kakanda senior sekaligus Dosen Pembimbing Immawan Rais Muharrami yang membantu penelitian ini dari awal penyusunan hingga terselesaikannya penelitian.

Ipmawan yang Saya banggakan dan Ipmawati yang Saya cintai pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 serta keluarga besar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Adik-adik serta kader-kader pengurus Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Karesidenan Soloraya (Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen).

Serta sahabat-sahabat yang tak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan semangat yang besar selama ini, membuat banyak catatan kenangan bersama-sama selama ini

Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Perbankan Syariah (Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2017-2019)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan setulus hati Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mudhofir Abdullah, M.Pd. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, SEI., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

8. Ayah, Ibu, dan Adik-adik terimakasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan.
9. Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.
10. Ipmawan dan Ipmawati Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah.
11. Ipmawan dan Ipmawati Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah se-Karesiden Soloraya.
12. Teman-teman satu kelas PBS C dan PBS D angkatan 2013.
13. Teman-teman HMJ Perbankan Syariah dan DEMA Institute.
14. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Muhammadiyah Manafi'ul Ulum Sambi Boyolali.
15. Serta semua pihak yang tak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis selama ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya Penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Juli 2018

Penulis

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the description of Islamic banking literacy levels of the Muhammadiyah Student Association Regional Leaders for the 2017-2019 Period. Aspects used in this study include aspects of the general description of Islamic banks, Islamic bank fund raising, and Islamic bank financing.

This research is a descriptive research based on survey of research subjects. The subject of this research is the Executive Board of Muhammadiyah Students Association of Central Java period 2017-2019. The object of this research is syariah banking literacy with case study of Regional Leadership Association of Muhammadiyah Central Java in the period 2017-2019.

The population in this study is the Executive Board of Muhammadiyah Central Java Students Association period 2017-2019 which amounted to 41 people. The sample of this research is done by saturated sampling technique. Data collection techniques used in this study is a questionnaire. Data analysis technique used in this research is descriptive analysis.

The results showed that the level of literacy of Regional Leadership Association of Muhammadiyah Central Java period 2017-2019 period of 58.63%. If the percentage is interpreted into the criteria of financial literacy level according to Chen & Volpe then 58.63% is in low category (<60%).

Keywords: Islamic banking literacy, financial literacy, economy.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat literasi perbankan syariah Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2017-2019. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek gambaran umum bank syariah, penghimpunan dana bank syariah, dan pembiayaan bank syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang didasarkan atas survei terhadap subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019. Objek dari penelitian ini yaitu literasi perbankan syariah dengan studi kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019 yang berjumlah 41 orang. Sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019 sebesar 58,63%. Jika persentase tersebut di interpretasikan ke dalam kriteria tingkat literasi keuangan menurut Chen & Volpe maka 58,63% berada dalam kategori rendah (< 60%).

Kata kunci: literasi perbankan syariah, literasi keuangan, ekonomi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIRO SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Batasan Masalah.....	12
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian.....	13
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.7. Jadwal Penelitian.....	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1. Kajian Teori	16
2.1.1 Pengertian Literasi.....	16
2.1.2 Literasi Keuangan.....	17
2.1.3 Konsep Literasi Keuangan Syariah.....	22
2.1.4 Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia	24
2.1.5 Literasi Perbankan Syariah	25
2.1.6 Analisis Tingkat Literasi Perbankan Syariah	26
2.1.7 Muhammadiyah.....	28
2.1.8 Ikatan Pelajar Muhammadiyah	31
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian	38
3.2. Jenis Penelitian.....	38
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.3.1 Populasi	38
3.3.2 Sampel.....	39
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	40
3.4. Data dan Sumber Data.....	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN	43
4.1. Gambaran Umum Penelitian	43
4.1.1. Gambaran Umum dan Sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah	43
4.1.2. Visi dan Misi Ikatan Pelajar Muhammadiyah.....	49

4.1.3.	Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah	53
4.1.4.	Pengurus PW IPM Jawa Tengah	55
4.2.	Hasil Analisis Data.....	57
BAB V PENUTUP		64
5.1.	Simpulan	64
5.2.	Saran	64
5.3.	Keterbatasan.....	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		68
CURRICULUM VITAE		84

DAFTAR TABEL

Table 1 (Tabel 2.1.).....	21
Table 2 (Tabel 2.2.).....	28
Table 3 (Tabel 2.3.).....	29
Table 4 (Tabel 4.1.).....	54
Table 5 (Tabel 4.2.).....	57
Table 6 (Tabel 4.3.).....	60
Table 7 (Tabel 4.4.).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 (Gambar 4.1.)	55
Gambar 2 (Gambar 4.2.)	56
Gambar 3 (Gambar 4.3.)	56
Gambar 4 (Gambar 4.4.)	58
Gambar 5 (Gambar 4.5.)	59
Gambar 6 (Gambar 4.6.)	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kisi-Kisi Penelitian	68
Lampiran 2 : Struktur PW IPM Jawa Tengah 2017-2019.....	76
Lampiran 3 : Data Responden Penelitian.....	80
Lampiran 4 : Data Kuessioner Responden.....	82
Lampiran 5 : Jadwal Penelitian	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan di suatu negara ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui fungsi intermediasinya, institusi keuangan memiliki peranan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014).

Lahirnya Bank Islam yang pertama yaitu Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 dan Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah pada tahun 1973, menjadi titik kebangkitan peradaban Islam yang modern dan dinamis. Kemudian diikuti lahirnya Perbankan Syariah diberbagai negara dan mampu mendapatkan respons positif dari masyarakat internasional (Dahlan, 2012: 10).

Perbankan Syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, perkembangan Perbankan Syariah bisa dikatakan relatif terlambat apabila berkaca pada negara-negara lainnya, meskipun sebetulnya kajian terhadap ekonomi dan keuangan islam sudah diwacanakan pada era 1980'an oleh Dawam Rahardjo, A, M. Saefuddin, dll. Terlebih Negara Indonesia adalah bagian dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan berpenduduk terbesar muslim di dunia (Dahlan, 2012: 10).

Beberapa tahun terakhir istilah Literasi Keuangan mulai mengemuka dan mulai diteliti oleh banyak pihak. Istilah literasi keuangan yang dikemukakan

literatur dan oleh para pakar keuangan tidak ada satupun yang persis sama. Menurut Lusardi dan Mitchell (2007) yang di Kutip oleh Rike (2013) dalam *Literasi Keuangan Islam (Sebuah Telaah Literatur)*, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola uang yang dimiliki secara bijak baik dalam bentuk investasi maupun penyaluran ke bidang sosial. Lebih khusus lagi, mengacu pada seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif terhadap investasinya agar dapat meningkatkan sumber daya keuangannya. Literasi keuangan dapat juga diartikan sebagai pengetahuan keuangan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan.

OJK (2013) dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia mendefinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Dengan definisi seperti ini, dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Salah satu isu penting dalam mengembangkan industri Perbankan Syariah nasional adalah terkait dengan sosialisasi dan edukasi publik. Berdasarkan Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia oleh OJK pada tahun

2016 yang dilaksanakan di 34 Provinsi dan 64 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* hanya mencapai angka 29.66%. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2016 hanya mencapai angka 8.11%. Khusus terhadap perbankan, tingkat literasi mencapai angka 28.94%, sedangkan tingkat literasi perbankan syariah mencapai angka 6.63%. hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga perbankan dan produk dan jasa perbankan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa perbankan, hanya berkisar seperempat dari total penduduk secara keseluruhan (OJK, 2016).

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh OJK, juga mendapat kesimpulan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan selaras dengan rendahnya pemanfaatan (*inklusi*) produk dan jasa perbankan oleh masyarakat, pada tahun 2016 hanya mencapai 6.63%, sedangkan pemanfaatan (*inklusi*) produk dan jasa perbankan syariah hanya mencapai 9.61%. Edukasi literasi keuangan bagi masyarakat menjadi suatu program strategis OJK dalam meningkatkan penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah (OJK, 2016).

Indeks literasi keuangan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai angka 33.51% dan merupakan terendah di pulau Jawa dan Bali, sedangkan indeks literasi keuangan syariah mencapai angka 11.17%, hal ini menunjukkan masyarakat di provinsi Jawa Tengah masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali (OJK, 2016).

Sebagaimana yang diketahui, sampai akhir tahun 2016 pertumbuhan perbankan syariah mencapai 19,67%, sedangkan *market share* perbankan syariah nasional baru menyentuh angka 5,12%, tertinggi sepanjang keberadaan perbankan syariah (www.republika.co.id/ diakses 06 Juli 2017). Hal ini masih dalam kategori rendah mengingat Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas adalah muslim yaitu sekitar 80% dan merupakan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Penelitian tentang tingkat literasi di kalangan pelajar dan atau mahasiswa akan perbankan syariah di Indonesia masih relatif terbatas, terutama penelitian yang sekaligus mencari faktor penyebab rendahnya tingkat literasi bank syariah tersebut. Setiap jurnal belum tentu memiliki variabel yang sama.

Menurut penelitian (Isnurhadi, 2013: 23) dalam *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang)*, menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap muamalah di dalam Islam berpengaruh positif terhadap tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang makin tinggi terhadap muamalah didalam Islam akan mempunyai kemungkinan untuk memahami tentang dunia perbankan syariah. Dengan demikian, peran dari masyarakat penganut agama Islam harus ditingkatkan baik terhadap umat Islam sendiri maupun masyarakat non Islam. Dengan makin tingginya pemahaman mereka maka akan meningkat pula atensi dan interest mereka terhadap perbankan syariah yang pada akhirnya dapat meningkat demand akan perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat lebih berkembang.

Mengutip dari Penelitian Irin (2012: 92) dalam *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya* menyebutkan bahwa latar belakang orang tua, pekerjaan orang tua, jabatan sosial orang tua dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam melakukan kegiatan belanja, menabung, investasi, kredit, penganggaran, dan pengelolaan keuangan. Menurut Ahmadi (2007: 229) status sosial ekonomi orang tua mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku dan pengalaman anak-anaknya. Perbedaan tingkat status sosial ekonomi akan berdampak pada munculnya perbedaan persepsi atas suatu obyek fisik atau obyek perilaku, yang pada akhirnya membentuk sikap yang berbeda pula. Persepsi positif terhadap karakteristik atau sifat obyek akan membentuk sikap positif pula. Hasil penelitian Lusardi et. al., (2010) "*parent education, parental wealth, and sophistication of the family finances significantly influence the financial literacy of children*". Fowdar (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat literasi seseorang dipengaruhi oleh tingkat pekerjaan orang tua. Selanjutnya penelitian Gutter (2008) menyatakan bahwa mahasiswa yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi juga mempunyai tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang tinggi.

Namun pada hasil pembahasannya menemukan bahwa status sosial ekonomi orang tua ternyata tidak mempunyai pengaruh langsung positif signifikan terhadap literasi finansial aspek sikap dan kognitif. Secara teori, orang tua yang memiliki pendapatan yang tinggi dapat memfasilitasi anaknya untuk menabung, dan sebagainya. Secara empiris ternyata ditemukan bahwa status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap literasi finansial aspek kognitif. Tanpa

pengarahan dan bimbingan dari orang tua, status status sosial ekonomi tidak mempengaruhi tingkat literasi finansial mahasiswa secara kognitif. Pengalaman dalam kehidupan ekonomi sehari-hari khususnya dalam hal keuangan tidak memberikan makna yang berarti bagi pemahaman dasar mahasiswa tentang keuangan, sehingga pengalaman yang dialami mahasiswa tidak memberikan kontribusi sebuah pengetahuan yang berarti bagi mahasiswa (Irin, 2012: 95-96).

Persyarikatan Muhammadiyah yang merupakan salah satu ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia, memutuskan untuk menempatkan seluruh dananya di perbankan syariah sebagai tindak lanjut fatwa riba bunga bank konvensional.

Pada tahun 2006 secara resmi mengeluarkan fatwa Nomor 08 tahun 2006 yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram serta menghimbau kepada setiap jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan Bank Syariah adalah sebagai mitra Muhammadiyah dalam sistem pengelolaan dana terpadu layanan manajemen kas dan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam bertanggung jawab untuk berperan dalam pengembangan sistem ekonomi syariah (PP Muhammadiyah, 2006).

Mengutip dari (www.muhammadiyah.or.id/ diakses pada 01 Juli 2017), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/12/2011) Muhammad Yunahar Ilyas yang pada saat itu menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan:

“Kami memilih tujuh bank ini setelah ada fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa bunga bank itu riba dan riba itu haram. Fatwa ini

berlaku untuk semua anggota Muhammadiyah termasuk yang di luar negeri, sehingga dananya akan dipindahkan ke tujuh bank itu”.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan MoU dengan tujuh Bank Syariah sebagai mitranya dalam sistem pengelolaan dana terpadu layanan manajemen kas. Bank syariah yang ditunjuk untuk mengelola dana (*cash management*) Muhammadiyah tersebut sebanyak tujuh buah. Ketujuh bank tersebut yaitu PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan UUS PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin memperkirakan, potensi dana yang bisa dihimpun dari kerja sama pengelolaan dana di lingkungan Muhammadiyah dengan tujuh bank syariah bisa mencapai Rp 10 triliun (www.muhammadiyah.or.id/ diakses pada 01 Juli 2017).

Menurut Drs. H. Tafsir, M.Ag, selaku Ketua PWM Jawa tengah menyampaikan bahwa 100 tahun pertama ini Muhammadiyah telah ter-branding dalam beberapa bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial. Menurutnya ada tiga tiang dalam sebuah negara yaitu penguasa (politik), pengusaha (ekonomi), dan para jenderal (keamanan). Ekonomi sangatlah penting dalam sebuah negara. Oleh karena itu Drs. H. Tafsir, M.Ag menghimbau di 100 tahun ke- 2 warga Muhammadiyah untuk meningkatkan ekonomi. Saat ini PWM Jawa Tengah telah bekerjasama dengan Bank Jateng Syariah, 75-80% pembiayaan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) Jateng ke Bank Jateng Syariah, pada tahun 2016 hampir 300 Miliar pembiayaan AUM di Bank Jateng Syariah, Ketua PWM Jawa Tengah

tersebut menyampaikan Bank Jateng Syariah siap mem-backup pengembangan AUM di Jawa Tengah (www.kabardua belas.com/ diakses pada 01 Juli 2017).

Menurut Musthafa dan Ahmad (2002: 138), dalam Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Ideologis menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki organisasi otonom, yaitu organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam Persyarikatan Muhammadiyah organisasi otonom (ORTOM) memiliki 7, yaitu:

- a. 'Aisyiyah
- b. Nasyiatul 'Aisyiyah
- c. Pemuda Muhammadiyah
- d. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
- e. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- f. Tapak Suci Putra Muhammadiyah
- g. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

Dalam penelitian ini akan dilakukan di Ortom IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), yaitu organisasi untuk mewadahi pelajar-pelajar Muhammadiyah, memiliki struktur organisasi dari tingkat Pimpinan Ranting sampai tingkat Pimpinan Pusat (www.muhammadiyah.or.id/ diakses pada 01 Juli 2017).

Pelajar dalam pengertian IPM (Ikatan pelajar Muhammadiyah) adalah mereka yang sedang dalam menempuh masa study/belajar yang masih berusia 12 tahun dan maksimal berusia 24 (IPM, 2016).

Karena sebuah keniscayaan bahwa pada kurun waktu sekitar 20-40 tahun mendatang, Bangsa ini perlahan akan digantikan oleh mereka yang saat ini di usia pelajar, termasuk nasabah/konsumen perbankan nasional, sangat memungkinkan sekali perbankan syariah akan bersaing dengan perbankan konvensional jika diasumsikan penduduk muslim di Indonesia mampu memahami prinsip-prinsip perbankan syariah.

Tantangan kedepan sangatlah besar, jika para pelajar saat ini tidak dibekali dengan pemahaman terhadap keuangan/perbankan syariah bukan tidak mungkin AUM yang dulu dibayangkan KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Persyarikatan Muhammadiyah) menjadi penolong umat akan berubah menjadi kapitalis, dimana tidak kelola secara syari'i, tentu hal ini tidaklah diinginkan.

Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam konteks pada tingkat Pimpinan Wilayah Jawa Tengah membawahi 35 Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah tentu dapat dijadikan gambaran Muhammadiyah Jawa Tengah pada era 20-40 tahun mendatang, dimana saat ini Muhammadiyah di Jawa Tengah memiliki asset berupa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang sangat banyak sekali, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Nominal uang yang beredar dipercaya hingga triliunan rupiah dan akan berkembang setiap tahunnya (www.pwmjateng.com/ diakses pada 01 Juli 2017).

Namun ironisnya meskipun Muhammadiyah telah menginstruksikan AUM dan Ortomnya untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, justru Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah pada saat ini masih menggunakan rekening bank konvensional.

Di lain pihak, sekitar 80% atau lebih penduduk Indonesia merupakan penganut agama Islam sehingga sudah selayaknya menggunakan kegiatan perbankannya dengan perbankan syariah, agar *market share* perbankan syariah meningkat sepanjang tahunnya. Penelitian ini juga berlandaskan pada kondisi bahwa penganut agama Islam. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dasar berkaitan dengan tingkat literasi perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, Peneliti tidak memfokuskan pada bagaimana seseorang melakukan aktivitas perbankannya dengan memahami tentang bank syariah akan tetapi Peneliti mencoba melangkah lebih ke belakang ingin meneliti sejauh mana masyarakat dalam konteks pelajar Muhammadiyah di Jawa Tengah sudah mempunyai pengetahuan, kesadaran, dan keyakinan akan bank syariah dan melihat apa saja yang kemudian berhubungan atau mempengaruhi tingkat literasi pelajar terhadap perbankan syariah.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka Peneliti mengambil judul skripsi “ANALISIS TINGKAT LITERASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Penduduk di Indonesia mayoritas menganut agama Islam atau sekitar 80% dari jumlah penduduk Indonesia, namun *market share* perbankan syariah masih sangat rendah yaitu sekitar 5,12% per akhir tahun 2016. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dasar berkaitan dengan tingkat literasi perbankan syariah.
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan Fatwa dalam keputusannya Nomor 08 tahun 2006 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba itu haram serta menetapkan bahwa perbankan syariah adalah mitra Muhammadiyah dalam sistem pengelolaan dana Persyarikatan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mendukung penuh terhadap pengembangan ekonomi syariah dan menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam pada umumnya untuk bermuamalat sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu fatwa ini bersifat mengikat secara keseluruhan dari AUM dan Ortom Muhammadiyah, maka setiap anggota IPM memiliki tanggungjawab menambah khazanah keilmuannya tentang ekonomi syariah dan bermuamalah dengan prinsip syariah karena IPM adalah bagian dari Muhammadiyah.
3. Meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menginstruksikan AUM dan Ortomnya beralih ke perbankan syariah, namun Pimpinan Wilayah Ikatan

Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah (PW IPM Jawa Tengah) pada saat ini masih menggunakan layanan perbankan konvensional.

4. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan OJK pada tahun 2016, provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat literasi keuangan yang paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, namun dari total 9680 Responden, tidak disebutkan berapa jumlah Responden kategori pelajar dari Jawa Tengah, maka dalam penelitian ini Peneliti akan mengambil objek di Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah.

1.3. Batasan Masalah

Peneliti melihat bahwasanya agar dapat mendapatkan suatu gambaran dan informasi yang jelas, rinci, fokus, dan spesifik mengenai ruang lingkup permasalahannya maka Peneliti akan memberikan batasan masalah tentang objek penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan dalam konteks pelajar Muhammadiyah di Jawa Tengah.
2. Penelitian ini mengambil objek pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah (PW IPM Jawa Tengah) periode 2017-2019.
3. Fokus penelitian ini adalah hanya mengenai tingkat literasi pelajar Muhammadiyah di Jawa Tengah terhadap Perbankan Syariah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum literasi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 terhadap Perbankan Syariah?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran umum literasi pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 terhadap Perbankan Syariah.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Memberikan dan menambah wawasan kepada segenap akademisi keuangan syariah/ekonomi syariah mengenai literasi keuangan syariah di masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan informasi untuk peneliti selanjutnya mengenai pembahasan tingkat literasi Perbankan Syariah.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan informasi bagi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah dalam upaya mencerahkan dan membangun kesadaran kader-kadernya terhadap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dalam upaya mewujudkan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan masalah yang ingin diteliti, dan terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti saat ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain dari penelitian, subyek atau tempat yang dijadikan penelitian, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada tempat penelitian dan peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Literasi

Literasi yang dalam bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin *littera* (huruf) yang pengertiannya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Namun demikian, literasi utamanya berhubungan dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan. Adapun sistem bahasa tulis itu sifatnya sekunder. Manakala berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak lepas dari pembicaraan mengenai budaya karena bahasa itu sendiri merupakan bagian dari budaya. Sehingga, pendefinisian istilah literasi tentunya harus mencakup unsur yang melingkupi bahasa itu sendiri, yakni situasi sosial budayanya. Menurut (Kern, 2000) dalam *Literacy and Language Teaching* mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai berikut:

Literacy is the use of socially-, and historically-, and culturally situated practices of creating and interpreting meaning through texts. It entails at least a tacit awareness of the relationships between textual conventions and their context of use and, ideally, the ability to reflect critically on those relationships. Because it is purpose-sensitive, literacy is dynamic – not static – and variable across and within discourse communities and cultures. It draws on a wide range of cognitive abilities, on knowledge of written and spoken language, on knowledge of genres, and on cultural knowledge. (Literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, dan historis, serta kultural dalam menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan-hubungan antara konvensi-konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan-hubungan itu. Karena peka dengan maksud/tujuan, literasi itu bersifat dinamis - tidak statis - dan dapat bervariasi di antara dan di dalam komunitas dan kultur diskursus/wacana. Literasi memerlukan

serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang *genre*, dan pengetahuan kultural).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa literasi membutuhkan kepekaan dan kemampuan yang kompleks. Literasi bersifat dinamis tidak statis menunjukkan literasi akan berkembang seiring berjalannya waktu dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan teks di atas adalah mencakup teks tulis dan teks lisan. Adapun pengetahuan tentang *genre* adalah pengetahuan tentang jenis-jenis teks yang berlaku/digunakan dalam komunitas wacana misalnya, teks naratif, eksposisi, deskripsi dan lain-lain.

2.1.2 Literasi Keuangan

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Literasi Keuangan adalah pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (RPOJK, 2016).

Literasi keuangan berkaitan dengan kompetensi seseorang untuk mengelola keuangan. Menurut (Huston, 2010) yang dikutip oleh Akmal dan Saputra (2016: 237) dalam Analisis Tingkat Literasi Keuangan mendefinisikan bahwa literasi finansial sebagai berikut:

“The ability to read, analyzes, manage and communicate about the personal financial condition that affect material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the future and respond competently to life events that affect everyday financial decisions, including events in the general economy”.

Literasi keuangan (*financial literacy*) juga dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan *personal financial literacy* didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan. *Personal financial literacy* mencakup pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*), pengetahuan mengenai manajemen uang (*cash management*), pengetahuan mengenai kredit dan utang, pengetahuan mengenai tabungan dan investasi serta pengetahuan mengenai risiko.

Masih dalam penelitian Akmal dan Saputra (2016: 238-239) Remund menyatakan empat hal yang paling umum dalam finansial literasi adalah penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi (Remund, 2010). Sedangkan Jumpstart Coalition membagi pengetahuan keuangan dalam topik-topik pendapatan, pengelolaan uang, tabungan dan investasi, dan pinjaman atau kredit. Byrne (2007) juga mengatakan bahwa pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan perencanaan keuangan yang salah dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Chen and Volpe (1998) menjabarkan literasi keuangan ke dalam 4 dimensi yaitu:

- a. Manajemen keuangan pribadi (*personal finance*) merupakan proses perencanaan dan pengendalian keuangan dari unit individu atau keluarga.
- b. Bentuk simpanan di Bank yang dapat dilakukan dalam bentuk tabungan (sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek), deposito berjangka (simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka

waktu tertentu), sertifikat deposito (deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan), dan giro (simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran).

- c. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Definisi asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain.
- d. Investasi merupakan suatu bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan (*return*) di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan saat ini.

Dalam konteks literasi keuangan pada pelajar dan mahasiswa, Ahmadi (2007) mengemukakan bahwa status sosial ekonomi orang tua mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku dan pengalaman anak-anaknya. Perbedaan tingkat status sosial ekonomi akan berdampak pada munculnya perbedaan persepsi atas suatu obyek fisik atau obyek perilaku, yang pada akhirnya membentuk sikap yang berbeda pula. Persepsi positif terhadap karakteristik atau sifat obyek akan membentuk sikap positif pula dan dalam hal ini termasuk persepsi terhadap pengelolaan keuangan. Lebih lanjut, Gutter menyatakan bahwa mahasiswa yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi juga memiliki tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan yang tinggi.

Mahasiswa yang berkesempatan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, terutama pada fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya memperoleh kesempatan memiliki pengetahuan keuangan yang lebih dibandingkan mahasiswa-

mahasiswa yang berada pada Fakultas lainnya. Kesempatan memperoleh pengetahuan tersebut tentunya memiliki implikasi terhadap pengetahuan keuangan mereka. Pembelajaran di Perguruan Tinggi sangat berperan penting dalam proses pembentukan *literasi finansial* mahasiswa. Melalui kombinasi berbagai metode pengajaran, media dan sumber belajar yang direncanakan dengan baik dan sesuai dengan kompetensi, diharapkan mampu memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memiliki kecakapan di bidang keuangan, sehingga mahasiswa menjadi siap dan mampu menghadapi kehidupan mereka saat ini maupun masa depan yang semakin kompleks (Widayati, 2012).

Menurut (OJK, 2013) agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

- a. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- b. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- c. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
- d. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Chen dan Volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai kemampuan mengelola keuangan (*financial literacy is money management knowledge*). Chan dan Volpe mengkategorikan literasi keuangan menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. < 60% berarti masyarakat memiliki pengetahuan mengenai keuangan yang rendah.
- b. 60% - 79% berarti masyarakat memiliki pengetahuan tentang keuangan yang sedang.
- c. 80% menunjukkan bahwa msyarakat memiliki pengetahuan keuangan yang tinggi (Chen dan Volpe, 1998: 109).

Table 1 (Tabel 2.1.)
Kriteria Analisis Deskriptif Presentasi

Kategori	Interval Data
Rendah	< 60%
Sedang	60% - 79%
Tinggi	> 80%

Sumber: Chen and Volpe (1998)

Pada survei yang dilakukan oleh Chen dan Volpe, literasi keuangan dibagi dalam 4 bagian (aspek). Aspek tersebut yaitu general personal finance knowledge, saving and borrowing, insurance, dan investment (Chen dan Volpe, 1998: 109).

2.1.3 Konsep Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah terjemahan dari *finance literacy* yang artinya melek keuangan. Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (OJK, 2013) yang dimaksud dengan literasi keuangan adalah:

“Rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (competence) dan keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam konteks pembangunan literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Literasi keuangan syariah juga bisa disebut dengan melek keuangan syariah dimana seseorang mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

Sedangkan dari sisi tujuannya, menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- a. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
- b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Dengan demikian upaya gerakan pembangunan literasi keuangan syariah adalah bertujuan pertama meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah.

Dengan demikian tujuan dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajibannya serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan syariah yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal serta menguntungkan.

Menurut Hogarth (2006) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah, melalui literasi keuangan seseorang diharapkan akan mampu (Irfan dan Laily, 2016: 221):

- a. Memanfaatkan sumber-sumber keuangan;
- b. Meningkatkan keamanan ekonomi;
- c. Meningkatkan kontribusi kepada masyarakat;
- d. Membawa dan membangun masyarakat ke arah yang lebih baik;

- e. Menghasilkan tenaga kerja yang terdidik dengan baik.

Semua hal tersebut dapat terlaksana karena ada keterkaitan antara pengetahuan dan perilaku. Hilgert dan Hogarth (2003) dalam Ekonomi Pembangunan Syariah, menjelaskan bahwa mereka yang memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, akan lebih memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih mampu menerima rekomendasi-rekomendasi terkait dengan perilaku keuangan. Oleh karena itu, edukasi keuangan syariah juga perlu direncanakan dengan baik (Irfan dan Laily, 2016: 221).

Selain hal-hal di atas, edukasi keuangan yang tepat juga akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan syariah. Bagaimana konsep akad dalam keuangan syariah, serta perbedaannya dengan transaksi keuangan konvensional, semuanya harus dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perbedaannya (Irfan dan Laily, 2016: 222).

Perlu disampaikan juga kepada masyarakat terkait bagaimana caranya mengakses lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Dengan pendekatan yang bersifat komprehensif, maka diharapkan tingkat kesadaran dan partisipasi publik terhadap institusi keuangan syariah dapat meningkat dari waktu ke waktu (Irfan & Laily, 2016: 222).

2.1.4 Tingkat Literasi Keuangan di Indonesia

Menurut (OJK, 2013) menyatakan bahwa pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan keuangan masyarakat sangat diperlukan, karena berdasarkan

survei yang dilakukan pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
- b. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- c. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- d. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.1.5 Literasi Perbankan Syariah

Menurut *Organisation for Economic Cooperation and Development/ Internasional Network on Financial Education* atau OECD/INFE yang dikutip oleh Oman & Lilis (2014: 23) mendefinisikan literasi keuangan (*financial literacy*) sebagai berikut:

“A combination of awareness, knowledge, skill, attitude and behaviour necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual well being.” (Literasi keuangan adalah suatu kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan keuangan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran individu).

Literasi perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku dalam membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang yang dalam hal ini spesifik perbankan syariah. Dengan kata yang lebih singkat dapat dikatakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang perbankan syariah. Pengetahuan dan kesadaran tentang perbankan syariah ini penting karena tanpa adanya kedua hal tersebut maka mustahil seseorang akan melakukan kegiatan perbankannya dengan perbankan syariah. Bahkan seseorang yang sudah memahami atau mempunyai kesadaran tentang bank syariahpun belum tentang menunaikan kegiatan perbankan menggunakan perbankan syariah (Oman dan Lilis: 2014: 23).

2.1.6 Analisis Tingkat Literasi Perbankan Syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi (2013: 7) dalam *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang)*, menyatakan bahwa penelitian ini mencoba mencari jawaban atas fenomena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berhubungan dengan perbankan syariah baik dalam bentuk menabung, meminjam atau berbagai pelayanan bank syariah lainnya. Tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan untuk menggunakan berbagai pelayanan perbankan syariah maka sulit bagi perbankan syariah untuk berkembang dengan cepat sementara di lain pihak Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Dalam penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif penelitian tersebut menyatakan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi

tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, yaitu variabel pengetahuan individu terhadap perbankan syariah, variabel upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, serta variabel upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah (Isnurhadi, 2013: 10).

Penelitian Zara dan Irfan (2015) dalam *Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah*, menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat literasi responden terhadap perbankan syariah berhubungan positif dengan utilitas produk pembiayaan yang ada. Adapun variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan adalah lama pendidikan, laba usaha dan dummy intensitas sosialisasi atau edukasi oleh bank syariah.

Selain itu, dalam penelitiannya menyatakan semakin tinggi tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, maka akan semakin memudahkan upaya untuk mendorong mereka menjadi "*juru kampanye*" bagi pengembangan industri perbankan syariah ke depan. Mereka akan dengan mudah mengajak warga masyarakat lainnya untuk menjadi nasabah bank syariah (Zara dan Irfan, 2015).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi literasi perbankan syariah seperti faktor pengetahuan individu, faktor sosial ekonomi, faktor promosi, faktor pendidikan, dan lain lain. Dalam penelitian ini, peneliti melihat faktor tingkat pendidikan masyarakat, yaitu masyarakat yang menempuh pendidikan baik yang sedang dalam proses pendidikan maupun yang telah selesai pendidikan. Sedangkan aspek yang akan diteliti untuk mengetahui tingkat literasi perbankan syariah adalah aspek gambaran umum bank syariah, pendanaan bank syariah, dan pembiayaan syariah.

Table 2 (Tabel 2.2.)
Aspek Literasi Perbankan Syariah

Aspek	Nomor	Bab
Gambaran Umum Bank Syariah	1-9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat pengetahuan Literasi Perbankan Syariah 2. Pengertian Bank Syariah 3. Prinsip dasar Bank Syariah 4. Pelarangan Riba, Gharar, Maysir 5. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 6. Fungsi Bank Syariah 7. Kegiatan usaha 8. Kegiatan sosial 9. Konsep operasional Bank Syariah
Penghimpunan Dana Bank Syariah	10-18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giro Wadi'ah 2. Tabungan Wadi'ah 3. Tabungan Mudharabah 4. Deposito Mudharabah al-Muthlaqah 5. Deposito Mudharabah al-Muqayyadah 6. Obligasi Mudharabah 7. Obligasi Ijarah
Pembiayaan Bank Syariah	18-26	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Mudharabah 2. Pembiayaan Musyarakah 3. Pembiayaan Ijarah 4. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik 5. Pembiayaan Murabahah 6. Pembiayaan Salam 7. Pembiayaan Istishna'

2.1.7 Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dulhijjah 1330 Hijriyah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul

(berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'Izzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita (Musthafa dan Ahmad, 2012: 113).

Di antara keunggulan Muhammadiyah dibanding gerakan Islam lain ialah kekuatan amal usaha yang dimilikinya. Dari lembaga pendidikan dan kesehatan hingga pelayanan sosial dan ekonomi semuanya tersebar di seluruh Nusantara. Amal usaha itu merupakan wujud dakwah *bil-hal* Muhammadiyah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas, sekaligus menjadi pilar strategis kemajuan umat Islam. Berikut adalah database Amal Usaha Muhammadiyah:

Table 3 (Tabel 2.3.)
Database Amal Usaha Muhammadiyah

No	Jenis Amal Usaha	Jumlah
1	TK/TPQ	4.623
2	Sekolah Dasar (SD)/MI	2.252
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs	1.111
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA	1.291
5	Pondok Pesantren	67
6	Perguruan Tinggi Muhammadiyah	171
7	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, BP, dll	2.119
8	Panti Asuhan, Santunan, Asuhan Keluarga, dll.	318
9	BMT	437
10	BPRS	762
11	Penerbitan	25

Sumber: www.muhammadiyah.or.id.

Raihan amal usaha yang sebesar itu sungguh tidak mudah, sebagai wujud dan hasil perjuangan yang penuh pengorbanan dari para perintis dan penerusnya baik di dari para pengelola amal usaha maupun pimpinan Persyarikatannya. Karena

itu menjadi kewajiban semua pihak untuk terus merawat, membina, meningkatkan, dan mengembangkan amal usaha itu menuju keunggulan dan kemanfaatan yang lebih baik lagi. Sebaliknya mencegah segala hal yang dapat merusak dan menjatuhkan amal usaha Muhammadiyah yang sangat berharga itu (Haedar, 2017).

Pada hari Ahad tanggal 21 Jumadil awal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dalam hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, memustuskan bahwa bunga bank adalah riba dan riba adalah haram (Fatwa PP Muhammadiyah, 2006).

Selain itu menyatakan bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif (Fatwa PP Muhammadiyah, 2006).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau kepada umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah serta menghimbau agar bermuamalat sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa PP Muhammadiyah, 2006).

2.1.8 Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) tidak lepas dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar sekaligus sebagai konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader (www.ipm.or.id/ diakses 01 Juli 2017).

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berdiri 18 Juli 1961, hampir setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Namun demikian, latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin metakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsong penyempurna perjuangan Muhammadiyah (www.muhammadiyah.or.id/ diakses 01 Juli 2017).

Maksud dan Tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT (AD/ART IPM, 2016).

Saat ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan 32 Pimpinan Wilayah, 355 Pimpinan Daerah, dan sejumlah

Pimpinan Cabang serta Pimpinan Ranting IPM di semua sekolah Muhammadiyah tingkat SLTP dan SLTA (IPM, 2016).

Sedangkan keanggotaan IPM adalah pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah yang berusia minimal berusia 12 tahun dan maksimal 24 tahun (AD/ART IPM, 2016).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian tentang tingkat literasi atau tingkat melek keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia masih sangat terbatas, terutama kajian yang meneliti tentang faktor atau penyebab dari rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian kali ini mencoba untuk mengungkapkan tingkat pengetahuan pelajar Muhammadiyah di Jawa Tengah dengan objek Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 di bidang keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

Kesempatan menumbuhkan perbankan syariah di Indonesia masih sangat luas, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Disamping itu, sebagian masyarakat Indonesia belum semuanya dapat mengakses layanan keuangan formal dengan mudah. Masyarakat yang belum terakses keuangan formal ini dapat menjadi tantangan perbankan syariah dalam memberikan jangkauan yang mudah kepada mereka. Ketika perbankan syariah

dapat mengakses masyarakat ini, maka secara langsung perbankan syariah dapat meningkatkan *market share*.

Disamping itu, dalam meningkatkan perbankan syariah di Indonesia, para praktisi juga harus bisa memberikan akses kepada instansi, lembaga, atau ormas berbasis islam yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu potensi besar yang bisa dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia adalah Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah berdiri sejak 1 abad yang lalu yang mana pada saat ini memiliki amal usaha yang sangat banyak sekali, bahkan di Provinsi Jawa Tengah sendiri dipercaya uang yang dikelola mencapai triliunan rupiah. Jika seluruh dana persyarikatan disimpan dan dikelola di perbankan syariah, maka *market share* perbankan syariah akan meningkat pula.

Penelitian Chen dan Volpe (1998) menyatakan bahwa tingkat *financial literacy* mahasiswa berada pada kategori rendah. Rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan seseorang salah dalam beropini dan melakukan keputusan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa gender, latar belakang pendidikan, tahun angkatan, usia, dan pengalaman berpengaruh terhadap tingkat *financial literacy* seseorang. Namun penelitian Mandell (2008) menunjukkan bahwa mahasiswa Amerika yang telah lulus dan berpengalaman dalam hidupnya memiliki tingkat *financial literacy* lebih tinggi. 75% pemuda Amerika memiliki tingkat *financial literacy* rendah sehingga memiliki kemampuan yang kurang dan terbatas dalam membuat keputusan keuangan yang menguntungkan (Yashica dan Kartini, 2017: 82-83).

Selanjutnya studi Margareta dan Arief (2015) menunjukkan tingkat literasi keuangan pada mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti adalah 48,91% termasuk dalam kategori rendah (< 60%). Serta jenis kelamin, usia, IPK dan pendapatan orang tua berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Namun tahun masuk mahasiswa (angkatan), tempat tinggal, dan pendidikan orang tua tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Penelitian Bhusan dan Medury (2013) menemukan bahwa tingkat *financial literacy* responden tidak begitu tinggi, serta tingkat *financial literacy* dipengaruhi gender, pendidikan, pendapatan, dan tempat kerja sedangkan tingkat *financial literacy* yang dimiliki individu tidak dipengaruhi oleh umur dan agama seseorang (Yashica dan Kartini, 2017: 82-83).

Penelitian Yashica dan Kartini (2017: 93-96) yang berjudul *Analisis Tingkat Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, mengemukakan hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan tingkat *financial literacy* mahasiswa berdasarkan gender. Selanjutnya hasil menunjukkan ada perbedaan yang signifikan pada tingkat *financial literacy* berdasarkan usia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat *financial literacy* berdasarkan tahun angkatan mahasiswa. Selanjutnya penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat *financial literacy* berdasarkan IPK. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat *financial literacy* berdasarkan IPK antara mahasiswa dengan IPK 2,50 sampai 3,00 dengan mahasiswa yang memperoleh IPK di atas 3,00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan *financial behavior* berdasarkan tingkat *financial literacy* mahasiswa. Pengetahuan yang tinggi

mengenai *financial literacy* tidak secara otomatis diikuti dengan pengambilan keputusan keuangan yang baik.

Penelitian Isnurhadi (2013: 11) yang berjudul *Kajian Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Palembang)*, menyatakan bahwa ada tiga variabel yang dapat mempengaruhi tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah, yaitu variabel pengetahuan individu terhadap muamalah dalam islam, variabel upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah, serta variabel upaya promosi yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan tiga variabel, yaitu pengetahuan individu terhadap muamalah dalam Islam, upaya promosi yang dilakukan oleh perbankan syariah dan faktor promosi yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Akmal dan Saputra (2016: 243) yang berjudul *Analisis Tingkat Literasi Keuangan*, menyimpulkan bahwa literasi keuangan mahasiswa FEBI Imam Bonjol Padang berada pada kategori sedang yaitu dari interpretasi data dapat dilihat mahasiswa memiliki pengetahuan namun kurang terampil dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Literasi keuangan mahasiswa itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pembelajaran keuangan di perguruan tinggi, status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga dan lainnya. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang berada pada sedang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dan Suramaya (2013: 139) dalam *Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi Palembang*, menunjukkan bahwa dari semua aspek literasi keuangan, baik dari aspek pengetahuan keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi mengindikasikan literasi keuangan yang rendah walaupun melalui pendidikan di sekolah sudah diberikan materi-materi perkuliahan yang berkaitan tentang aspek-aspek dalam literasi keuangan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pelajaran tentang literasi keuangan di sekolah tinggi belum cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap mahasiswa. Pengetahuan tentang literasi keuangan harus diberikan sedini mungkin kepada anak sehingga mereka dapat mengaplikasikan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tenaga pengajar di perguruan tinggi (dosen) harus menggunakan metode-metode pembelajaran yang mudah dipahami mahasiswa.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai keuangan masih belum memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian mengenai tingkat literasi keuangan dimana hasilnya rata-rata adalah sedang. literasi keuangan atau melek keuangan adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh pelajar dan mahasiswa dimana kedepannya mereka akan menghadapi kompleksitas kebutuhan akan produk dan jasa keuangan yang semakin beragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan tepat maka diperlukan pengetahuan keuangan yang lebih mendalam, sehingga penelitian mengenai tingkat literasi keuangan penting untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dapat diketahui beberapa hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian yaitu pada penelitian terdahulu berusaha untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan mahasiswa dan atau menguji faktor-faktor yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk rencana penelitian lebih fokus untuk membahas mengenai literasi perbankan syariah pada kalangan pelajar yang dijadikan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar tingkat literasi perbankan syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Bulan Juli 2017 sampai dengan Bulan Juli 2018. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kantor Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl. Singosari Raya No 33, Pleburan, Kota Semarang, Jawa Tengah Telp. (024) 8316010.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 29) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menurut Istijanto (2009: 94), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pengolahan datanya berupa angka yang menggunakan analisis statistik deskriptif.

3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang didalamnya terdapat obyek dan subyek, memiliki kualitas dan karakteristik tertentu ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi tidak hanya orang saja melainkan obyek dan benda lain yang ada di dalamnya.

Populasi juga tidak hanya jumlah obyek dan subyek tetapi seluruh sifat dari obyek dan subyek yang diteliti. Populasi yang Peneliti amati adalah pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 yang berdasarkan SK adalah berjumlah 43 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013: 7), sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi perhatian. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jika jumlah populasi terlalu besar, sedangkan peneliti tidak mungkin mempelajari semuanya karena ada beberapa faktor hambatan maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diperoleh dari populasi. Sampel harus benar-benar representatif (mewakili) dari populasi (Sugiyono, 2015: 81). Sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah 2017-2019.

Menurut Sugiyono (2015: 85) menyatakan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *sensus sampling*. Teknik *sensus sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015: 85). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Selanjutnya penulis bertanya kepada anggota didalamnya tentang pemahamannya terhadap perbankan syariah.

3.4. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah data primer. Menurut Istijanto (2009: 38), data primer merupakan data asli yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga peneliti adalah pihak pertama yang memperoleh data tersebut. Data primer diperoleh dari kuesioner yang di isi oleh pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, menurut Suhartanto (2014: 203) menjelaskan bahwa kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang terdiri atas beberapa pertanyaan agar nantinya dijawab oleh responden.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan kuesioner kepada pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah melalui 2 cara, yaitu

pemberian kuesioner secara manual dengan lembar kertas (offline) dan pemberian kuesioner dengan menggunakan media Internet google form (online). Responden yang telah mengisi kuesioner offline tidak diberikan lagi kuesioner online dan sebaliknya.

Dalam penelitian ini memprioritaskan menggunakan kuesioner offline, hal ini dikarenakan Penulis dapat melakukan pengawasan terhadap responden agar memahami pertanyaan terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun karena faktor jarak dan biaya, Penulis memberikan alternatif dengan menyediakan kuesioner online, hal ini untuk responden yang sulit untuk ditemui secara langsung oleh Penulis.

Riset online pada dasarnya sama dengan riset offline, letak perbedaan dasar hanyalah masalah sarana yang digunakan, yaitu Internet. Dengan kata lain, riset online ialah memindahkan kegiatan riset offline melalui media Internet dan komputer sehingga pelaksanaan riset dapat dilakukan secara online (Jonathan Sarwono, 2014: 5-6).

Kedua cara pemberian kuesioner memiliki pertanyaan yang sama dan skala yang sama, kemudian dikumpulkan untuk diolah dengan teknik analisa yang sama. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan maupun pernyataan tentang 3 aspek literasi perbankan syariah, yaitu gambaran umum bank syariah, penghimpunan dana bank syariah, dan pembiayaan bank syariah.

Definisi operasional dalam penelitian ini menggunakan definisi dari buku yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK) BI dan (Kemenristekdikti & OJK).

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu teknik analisa yang menggambarkan fenomena atau karakteristiknya dari data. Karakteristik yang diamati, diantaranya adalah frekuensi, presentase, rata-rata, dan standar deviasi data penelitian (Mendari dan Kewal, 2013: 134).

Jawaban yang telah diisi responden dari lembar kertas kuesioner (offline) dan media Internet google form (online) kemudian dikumpulkan menjadi satu database. Setiap pertanyaan yang dijawab benar akan mendapatkan skor 1 dan pertanyaan yang dijawab salah mendapatkan skor 0. Jawaban benar dihitung lalu dibagi dengan seluruh pertanyaan dan dikali dengan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan tersebut, untuk mengetahui kriteria tingkat literasi keungan menurut Chen & Volpe, selanjutnya hasil yang diperoleh dalam persentase dikonsultasikan dan dikelompokkan ke dalam tabel kriteria analisis deskriptif yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, menengah, dan rendah.

Dari data yang diperoleh mengenai literasi perbankan syariah pengurus PW IPM Jawa Tengah Periode 2017-2019 secara umum, maka penarikan kesimpulan dapat disimpulkan dengan rumus:

$$\text{Rata - rata (\%)} = \frac{\text{Jumlah Total Skor Responden (\%)}}{\text{Jumlah Total Responden}}$$

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum dan Sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dulhijjah 1330 Hijriyah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'Izzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita (Musthafa dan Ahmad, 2012: 113).

Menurut Khoirudin (2017) dalam bukunya yang berjudul *Demi Pena*, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, beraqidah Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar

Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpenggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsong penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961. Pada tahun 1919 didirikan Siswo Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1926, di Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muhammad-iyah). Selanjutnya pada tahun 1933 berdiri Hizbul Wathan yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.

Setelah tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1950, di Sulawesi (di daerah Wajo) didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954, di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Muhammadiyah (yaitu Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah). Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se Jawa Tengah. Akan tetapi, upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan

meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri.

Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik umat Islam secara keseluruhan. Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita) yang berisikan tentang satu kesatuan umat Islam, bahwa:

- a. Umat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi
- b. Satu gerakan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- c. Satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)
- d. Satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII)
- e. Satu Kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI)

Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan umat Islam Indonesia.

Di samping itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong angkatan muda Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi'atul 'Aisyiyah, yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah.

Dengan kegigihan dan kemantapan para aktivis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mulai mendapat titik-titik terang dan mulai menunjukkan keberhasilannya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktivitas para pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah. Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan-pembicaraan mengenai perlunya berdiri organisasi pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan keputusan konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut tersebut akhirnya diperkuat pada Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah ke II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Keputusan II/No. 4). Keputusan tersebut di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Mukhtamar Pemuda Muhammadiyah meminta kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran supaya memberi

kesempatan dan menyerahkan kompetensi pembentukan IPM kepada PP Pemuda Muhammadiyah

- b. Muktamar Pemuda Muhammadiyah mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari pembahasan-pembahasan muktamar tersebut, dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan pendapat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

Kata sepakat akhirnya dapat tercapai antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirian IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961, dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pimpinan IPM (tingkat ranting) didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya Pimpinan IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam UU Ke-ormas-an, bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Sementara di sekolah-

sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu (Akbar Tanjung) secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM, agar IPM melakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah.

Dalam situasi kontraproduktif tersebut, akhirnya Pimpinan Pusat IPM membentuk tim eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengkajian yang intensif, tim eksistensi ini merekomendasikan perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muhammadiyah. Perubahan ini bisa jadi merupakan sebuah peristiwa yang tragis dalam sejarah organisasi, karena perubahannya mengandung unsur-unsur kooptasi dari pemerintah. Bahkan ada yang menganggap bahwa IPM tidak memiliki jiwa heroisme sebagaimana yang dimiliki oleh PII yang tetap tidak mau mengakui Pancasila sebagai satusatunya asas organisasinya.

Namun sesungguhnya perubahan nama tersebut merupakan blessing in disguise (rahmat tersembunyi). Perubahan nama dari IPM ke IRM sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi ini yang tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis pelajar yang lain, seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat IPM Nomor VI/PP.IPM/1992, yang selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1992 melalui Surat Keputusan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian, secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 November 1992 (Ideologi Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 2016: 12-15).

4.1.2. Visi dan Misi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Visi dan Misi IPM Setelah melihat latar belakang dan sejarah perjuangan IPM, sebagaimana tergambar di Muqaddimah, maka Visi dan Misi yang harus terbangun untuk menata perjuangan IPM ke depan.

A. Visi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

1. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi keIslam-an

Visi ke-Islam-an tersebut dimaknai sebagai pengakuan IPM bahwa Islam adalah agama yang membawa kebenaran, keadilan, kesejahteraan dan ketenteraman bagi seluruh umat manusia. Islam tersebut secara normatif mengandung nilai-nilai perubahan yang konstruktif di setiap tempat dan masa. Dan visi ke-Islaman IPM dipakai untuk mengonstruksi masa depan perjuangan IPM, sehingga benar-benar terwarnai oleh nilai hakiki ajaran Islam sebagai ajaran wahyu yang selalu cenderung kepada kebenaran dan membawa keselamatan.

2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi keilmuan

Visi keilmuan IPM didasari pada pandangan mendasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah terhadap Ilmu Pengetahuan. Pandangan tersebut berakar pada keyakinan bahwa pada hakikatnya sumber ilmu di dunia ini adalah Allah SWT. Konsekuensinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan harus berawal dan mendapat kontrol dari sikap pasrah dan tunduk kepada Allah swt.

3. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi kemasyarakatan

Visi kemasyarakatan dalam gerakan IPM berangkat dari kesadaran IPM untuk selalu berpihak kepada cita- cita pengetahuan masyarakat sipil. Karena dengan masyarakat madani dapat dibangun konstruksi negara nasional yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan serta mengupayakan partisipasi penuh segenap elemen bangsa dengan kemajemukan dan keanekaragaman potensi.

4. Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah gerakan yang memiliki visi kekaderan

Visi Kaderisasi dalam gerakan IPM bermakna bahwa IPM tidak bisa mengingkari kodratnya sebagai organisasi generasi muda penerus masa depan baik di lingkungan Muhammadiyah maupun bangsa Indonesia ini. Penegasan ini juga merupakan wujud kesadaran IPM tentang pentingnya Kaderisasi.

B. Misi Ikatan Pelajar Muhammadiyah

1. Memperjuangkan Nilai-Nilai Ke-Islam-an

Implementasi ajaran Islam dalam misi gerakan IPM tercermin dari keberpihakan IPM kepada kebenaran dan pembaharuan dengan menitikberatkan pada penyantunan pelajar dan pelajar, kontribusi dalam transformasi masyarakat dan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kerangka dasar gerakan IPM terdiri dari;

- a. Ajaran Islam sebagai sumber nilai inspirasi dan motivasi dalam menentukan visi gerakan IPM.
- b. Dalam misi gerakan IPM terdapat nilai dasar yang dipakai sebagai substansi dari misi tersebut yaitu kebenaran dan pembaharuan. Kebenaran mengandung semangat moral dan ilmiah, sedangkan pembaharuan mengandung semangat jihad, ijtihad dan mujahadah.

2. Membangun Tradisi Keilmuan

Ikatan Pelajar Muhammadiyah membawa misi keilmuannya kepada tatanan kehidupan yang manusiawi dan beradab serta jauh dari tatanan kehidupan yang sekularistik, hedonistik dan mekanistik (merupakan implikasi serius dari perkembangan IPTEK sekarang ini). Pelajar muslim sebagai objek dan subjek dalam gerakan IPM dalam mengembangkan potensi keilmuannya harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Dan potensi keilmuan pelajar dapat dikembangkan dalam komunitas yang memiliki tradisi keilmuan. Dalam

membangun tradisi keilmuan didasarkan pada asumsi dan prinsip antara lain:

- a. Ilmu pengetahuan harus dikuasai untuk mendapatkan kedudukan sebagai manusia terhormat dan berkualitas dihadapan Allah SWT
- b. Semangat menggali khazanah keilmuan harus dibarengi dengan eksplorasi spiritualitas, sehingga tidak melahirkan karakter manusia berilmu yang sekular.
- c. Dengan ilmu pengetahuan perspektif pelajar tentang realitas sosial menyatu dengan perspektifnya tentang Tuhan / Agama.

3. Membentuk Masyarakat Beradab

Masyarakat beradab adalah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya manusia beradab secara sosial politik juga dikatakan sebagai masyarakat yang mandiri dan terberdaya, kondisi masyarakat yang demikian itulah yang diperjuangkan oleh IPM dengan potensi kader-kadernya. Keberpihakan IPM kepada masyarakat beradab dapat digambarkan:

- a. IPM melakukan penguatan masyarakat pelajar dengan membangun potensi ideologis, intelektualitas dan politik untuk membawa pelajar sebagai pembaharu dalam struktur masyarakat dan kekuatan kritik terhadap kekuasaan.
- b. IPM menyadari akan sangat strategis dan pentingnya melakukan penyadaran sosial politik (kemasyarakatan sejak dini kepada salah satu elemen masyarakat yang bernama pelajar karena mengingat

kondisi mereka yang masih kosong dari kepentingan-kepentingan, sehingga sangat efektif untuk dapat menggerakkan dan menyerukan kepentingan moral).

- c. Sehingga dapat disebutkan adanya dua kepentingan ketika IPM melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat kemasyarakatan;
- IPM berkepentingan untuk melakukan penyadaran hidup bermasyarakat dalam diri pelajar dalam rangka penguatan kesadaran bermasyarakat sipil.
 - IPM berkepentingan untuk terlibat dalam transformasi masyarakat secara aktif dan dinamis.

4. Menciptakan Kader Tangguh

Amanat Muktamar XIII merujuk kepada hasil Semiloka Kader tahun 2002 serta rumusan Sistem Perkaderan IPM (Hijau) mengarahkan fokus dan konsentrasi serta prioritas setiap level organisasi IPM melaksanakan perkaderan dengan benar dan sesungguhnya. SPI Hijau merupakan salah satu metodologi pembacaan IPM terhadap kebutuhan masa kini.

4.1.3. Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Dalam perjalannya, tujuan IPM pun mengalami dinamika dan perubahan yang bersifat redaksional. Perubahan ini, tentu dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dihadapi oleh IPM dari masa ke masa. Tujuan-tujuan tersebut sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Table 4 (tabel 4.1.)
Dinamika Rumusan dan Tujuan IPM 1961-2015

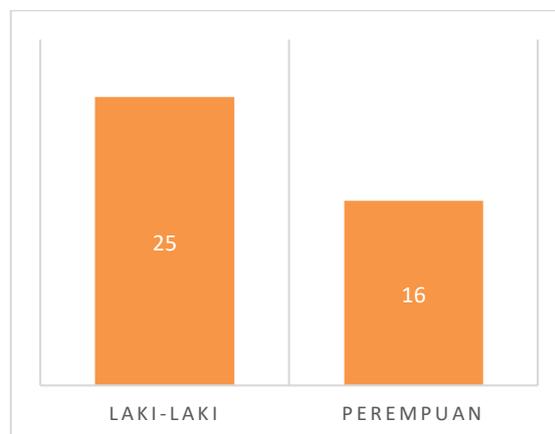
No	Muktamar	Tahun	Rumusan Maksud dan Tujuan IPM
1	Munas I Jakarta	1966	Terbentuknya pelajar Muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah
2	Muktamar VIII Yogyakarta	1989	Terbentuknya pelajar Muslim yang berakhlak mulia, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala
3	Muktamar XIII Yogyakarta	2002	Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT
4	Muktamar XV Medan	2006	Terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.
5	Muktamar XVI Surakarta	2008	Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil, dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya

Sumber: (Ideologi Gerakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 2016: 19)

4.1.4. Pengurus PW IPM Jawa Tengah

Responden dalam penelitian mengenai Tingkat Literasi Perbankan Syariah yaitu seluruh pengurus PW IPM Jawa Tengah yang secara resmi dan sah telah mendapatkan SK (Surat Keputusan) dengan jumlah pengurus terdapat 43 orang. Namun, dari total tersebut hanya 41 kuesioner yang layak dan dapat digunakan untuk mengolah data lebih lanjut.

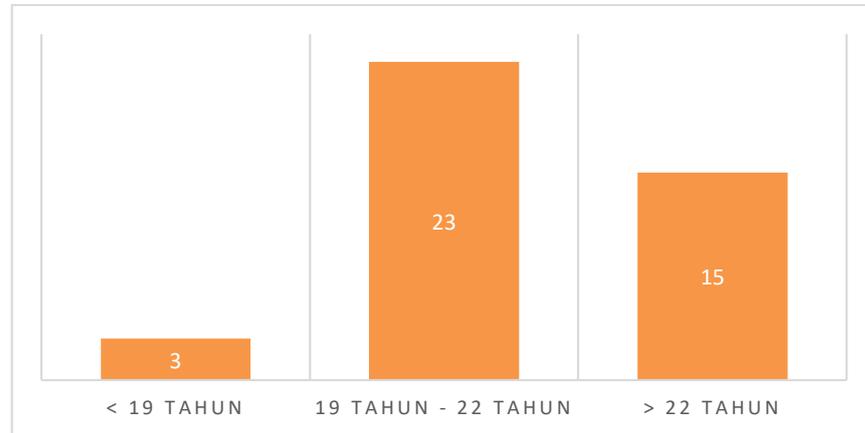
Gambar 1 (Gambar 4.1.)
Responden berdasarkan jenis kelamin



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responden berjenis kelamin perempuan. Responden Laki-laki berjumlah 25 orang atau sebesar 60,9% dan responden Perempuan berjumlah 16 orang atau sebesar 39,1%.

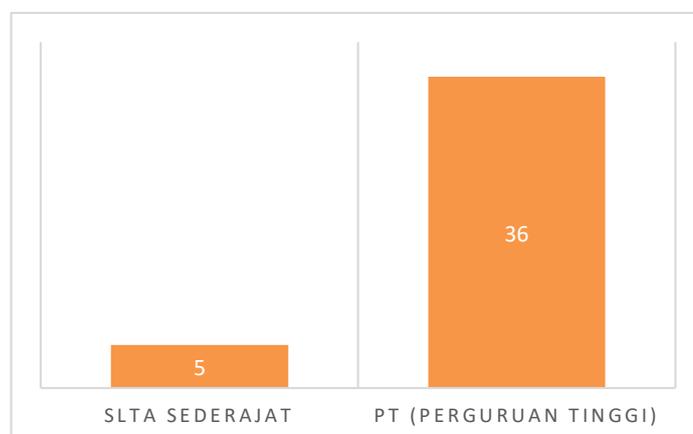
Gambar 2 (Gambar 4.2.)
Tabel Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa dari total 41 responden, responden dengan usia < 19 Tahun berjumlah 3 orang atau 7,3%, responden dengan usia 19 Tahun – 22 Tahun berjumlah 23 orang atau 56.1%, dan responden dengan usia > 22 Tahun berjumlah 15 orang atau 36.6%.

Gambar 3 (Gambar 4.3.)
Tabel Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui dari total 41 responden, responden berpendidikan SLTA berjumlah 5 orang atau 12.2% dan responden berpendidikan PT berjumlah 36 orang atau 87.8%.

4.2. Hasil Analisis Data

Cara menghitung tingkat literasi perbankan syariah adalah dengan cara jawaban responden yang benar lalu dibagi dengan seluruh pertanyaan dan dikalikan 100.

Menurut Chen and Volpe (1998) pengkategorian literasi keuangan personal dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. < 60% yang berarti individu memiliki tingkat literasi yang rendah
2. 60% - 79% yang berarti individu memiliki tingkat literasi yang sedang
3. > 80% yang menunjukkan individu memiliki tingkat literasi yang tinggi

Tingkat literasi perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 5 (Tabel 4.2.)
Tingkat Literasi Perbankan Syariah Secara Keseluruhan

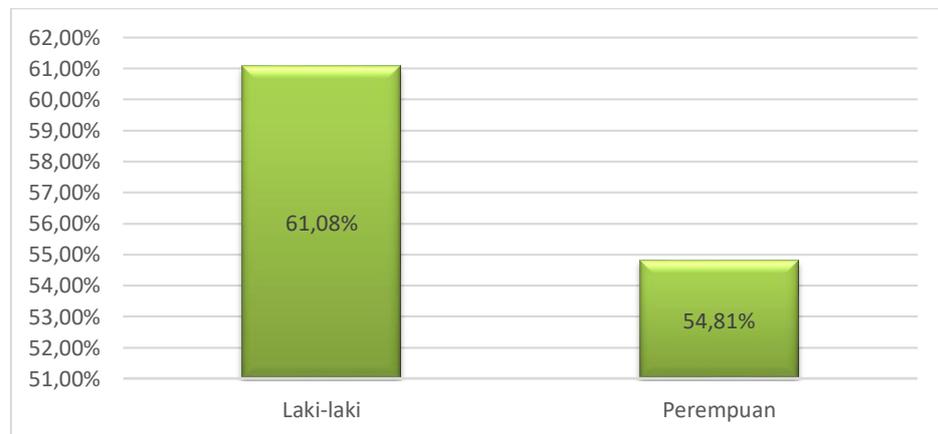
Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
nilai literasi	41	31	85	58,63
Valid N (listwise)	41			

Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan data yang telah diolah pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai terendah adalah 30,77% dan nilai tertinggi adalah 84,62%. Dapat diketahui bahwa dari 26 pertanyaan literasi perbankan syariah, ada responden yang hanya mampu

menjawab 8 pertanyaan dengan benar (30,77%) dan ada responden yang mampu menjawab 22 pertanyaan dengan benar (84,62%). Sedangkan rata-rata tingkat literasi perbankan syariah adalah 58,63%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah PW IPM Jawa Tengah adalah pada tingkat yang rendah (< 60%).

Gambar 4 (Gambar 4.4.)
Tingkat Literasi Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan hasil olah data pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat literasi responden berjenis kelamin laki-laki lebih besar dari pada perempuan, responden berjenis kelamin laki-laki memiliki tingkat literasi pada kategori sedang yaitu sebesar 61,08%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan memiliki tingkat literasi pada kategori rendah yaitu sebesar 54,81%.

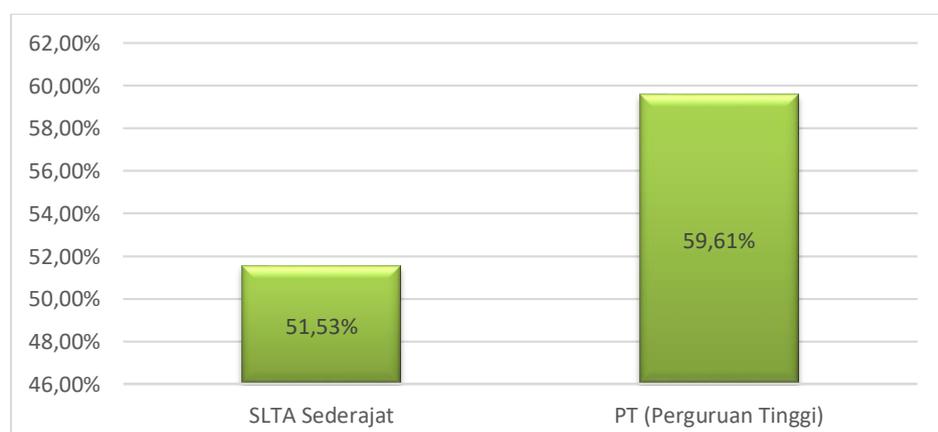
Gambar 5 (Gambar 4.5.)
Tingkat Literasi Perbankan Syariah Berdasarkan Usia



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan data pada gambar diatas menunjukkan bahwa usia mempengaruhi tingkat literasi responden, terbukti responden pada usia dibawah 19 Tahun memiliki literasi yang paling rendah yaitu sebesar 43,59%, responden dengan usia diantara 19 Tahun sampai 22 Tahun memiliki literasi sebesar 55,35%, sedangkan responden dengan usia diatas 22 Tahun memiliki literasi yang lebih baik yaitu sebesar 66,67%.

Gambar 6 (Gambar 4.6.)
Tingkat Literasi Perbankan Syariah Berdasarkan Pendidikan



Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Berdasarkan data pada gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat literasi responden dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi memiliki literasi yang lebih baik dari pada responden yang hanya berlatar belakang pendidikan SLTA Sederajat. Responden dengan latar belakang SLTA Sederajat memiliki tingkat literasi sebesar 51,53%, sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi memiliki literasi sebesar 59,61%.

Table 6 (Tabel 4.3)
Frekuensi Tingkat Literasi Perbankan Syariah

Nilai				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
31	3	7,3	7,3	7,3
42	4	9,8	9,8	17,1
50	4	9,8	9,8	26,8
54	4	9,8	9,8	36,6
58	6	14,6	14,6	51,2
62	6	14,6	14,6	65,9
Valid 65	2	4,9	4,9	70,7
69	6	14,6	14,6	85,4
73	3	7,3	7,3	92,7
77	1	2,4	2,4	95,1
85	2	4,9	4,9	100,0
Total	41	100,0	100,0	

Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 21 responden atau 51.22% memiliki tingkat literasi yang rendah, sebanyak 18 responden atau 43.90% memiliki tingkat literasi yang sedang, dan sebanyak 2 responden atau 4.88% memiliki tingkat literasi yang tinggi.

Table 7 (Tabel 4.4.)
 Persentase Responden yang Menjawab dengan Benar Untuk Setiap Pertanyaan

No	Area dari Literasi Perbankan Syariah	Tingkat Literasi Perbankan Syariah (%)		
		Rendah <60%	Sedang 60%-79%	Tinggi >80%
	Gambaran Umum Perbankan Syariah		64,23%	
1	Manfaat Literasi Perbankan Syariah			88,80%
2	Pengertian Bank Syariah			88,80%
3	Prinsip dasar bank syariah			82,93%
4	Pelarangan Riba, Maysir, dan Gharar	31,71%		
5	Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	41,46%		
6	Fungsi Bank Syariah			90,24%
7	Kegiatan Usaha	34,14%		
8	Kegiatan Sosial			82,92%
9	Konsep Operasional Bank Syariah	39,02%		
	Pendanaan Bank Syariah	55,01%		
10	Giro <i>Wadi'ah</i>	46,34%		
11	Giro <i>Wadi'ah</i>	41,46%		
12	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	34,14%		
13	Tabungan <i>Mudharabah</i>		70,73%	
14	Deposito	53,65%		
15	Deposito/ Investasi Umum (tidak terikat)	29,26%		
16	Deposito/ Investasi Khusus (terikat)		78,04%	
17	Obligasi/ Sukuk <i>Mudharabah</i>		68,29%	
18	Obligasi/ Sukuk <i>Ijarah</i>		73,17%	
	Pembiayaan Bank Syariah	54,88%		
19	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	51,22%		

20	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	19,51%		
21	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	39,02%		
22	Pembiayaan <i>Ijarah muntahiya bit tamlik</i>			82,92%
23	Pembiayaan <i>Murabahah</i>			80,48%
24	Pembiayaan <i>Salam</i>		70,73%	
25	Pembiayaan <i>Istishna'</i>		65,85%	
26	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	41,46%		

Sumber: Hasil Analisis Data 2018

Tabel diatas menunjukkan persentase responden yang menjawab setiap butir pertanyaan dengan benar serta rata-rata jawaban yang benar untuk setiap area pertanyaan tentang literasi perbankan syariah. Dalam area Gambaran Umum Bank Syariah dapat diketahui rata-rata jawaban responden yang benar adalah 64,23%. Area Pendanaan Bank Syariah diketahui rata-rata jawaban benar dari responden adalah 55,01%. Area Pembiayaan Bank Syariah dapat diketahui rata-rata jawaban benar dari responden adalah sebesar 54,88%.

Chen and Volpe (1998) dalam penelitiannya tentang literasi keuangan dengan jumlah responden sebanyak 924 mahasiswa menemukan bahwa tingkat literasi keuangan berada dalam kategori yang rendah. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa laki-laki lebih memahami *financial literacy* dibandingkan dengan perempuan. Hal ini berbanding lurus dengan penemuan yang terdapat dalam penelitian ini.

Mendari dan Kewal (2013) dalam penelitiannya tentang literasi keuangan dengan jumlah responden sebanyak 285 responden menunjukkan 277 responden

atau 97,19% responden memiliki tingkat literasi keuangan rendah, dan hanya 8 responden atau 2,81% yang memiliki tingkat literasi keuangan kategori sedang.

Akmal dan Saputra (2016) dalam penelitiannya tentang literasi keuangan, dari 100 responden menunjukkan bahwa literasi keuangan mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang pada kategori sedang, yaitu sebesar 74,75%.

Margaretha dan Pambudhi (2015) dalam penelitiannya tentang literasi keuangan dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 FEB Universitas Trisakti sebesar 48,91% atau termasuk dalam kategori tingkat literasi yang rendah.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat literasi perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi perbankan syariah PW IPM Jawa Tengah Periode 2017-2019 adalah sebesar 58,63% atau dapat dikatakan dalam kategori yang rendah.

Tingkat literasi perbankan syariah yang diukur berdasarkan gender menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat literasi yang lebih baik dari pada perempuan. Sedangkan berdasarkan usia menunjukkan bahwa usia mempengaruhi tingkat literasi perbankan syariah, dimana rata-rata responden usia diatas 22 Tahun memiliki literasi yang lebih baik dari pada responden dengan rata-rata usia 19 Tahun – 22 Tahun dan dibawah 19 Tahun. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa rata-rata responden dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi memiliki literasi perbankan syariah yang lebih baik dari pada rata-rata responden yang berlatar belakang pendidikan hanya SLTA Sederajat.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat literasi perbankan syariah PW IPM Jawa Tengah Periode 2017-2019, maka terdapat saran yang harus diperhatikan:

1. Memberikan saran kepada para pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah untuk meningkatkan literasinya terhadap bank syariah agar terhindar dari segala aktifitas perbankan yang sebetulnya tidak dibutuhkan dan dengan tingginya literasi perbankan syariah akan berdampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
2. Memberikan saran kepada pihak OJK, Bank Syariah, maupun dunia pendidikan untuk memberikan edukasi perbankan syariah kepada masyarakat agar dapat meningkatkan literasinya terhadap perbankan syariah, sehingga dapat meningkatkan market share perbankan syariah di Indonesia.

5.3. Keterbatasan

Dalam penelitian tentang analisis tingkat literasi perbankan syariah dengan objek Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2017-2019 terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyebaran kuesioner, tidak semua responden dapat ditemui secara langsung karena keterbatasan jarak dan biaya.
2. Keterbatasan dalam mencari referensi yang secara spesifik membahas tentang analisis tingkat literasi perbankan syariah.
3. Penelitian ini belum memperhatikan faktor-faktor lain yang menjadi pengaruh tingkat literasi seseorang, seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan pedesaan dan perkotaan, faktor penghasilan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, H., & Saputra, Y. E. (2016). Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1, No. 2, 235-244.
- Ascarya & Yumanita, D., (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan (PPSK).
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Service Review*, Vol. 7, No, 107-128.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- IPM. (2016). *Sejarah Ikatan Pelajar Muhammadiyah*. www.ppipm.or.id.
- Irin (2012). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. ASSET: Junal Akuntansi dan Pendidikan. Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012.
- Khoirudin, Azaki. (2017). *Demi Pena*. Cetakan ke 2. 11 Juni 2017. Yogyakarta: PP IPM.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Economic Literature*, Vol. 52, Non 1, 5-44.
- Mandari, A. S., & Kewal. (2013). Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa STIE Musi. *Economia*, Vol. 9, No. 2, 130-140.
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi. *Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 17, No. 1, 76-85.
- Mufliani, Zara Fathia & Beik, Irfan Syauqi. (2015, 27 April 2015). *Tingkat Literasi Pelaku Usaha Mikro Terhadap Perbankan Syariah*. *Republika*. Hal: 26.
- Nashir, Haedar. (2017). *Ideologisasi Amal Usaha Muhammadiyah*. 01 Juli 2017. www.pwmu.co.
- OJK & Kemenristekdikti. (2016). *Industi Jasa Keuangan Syariah*.
- OJK. (2016). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen dan/atau Masyarakat. Sekretariat OJK. Jakarta. 01 Juli 2017. www.ojk.go.id.

- POJK Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
- Sarwono, Jonathan. (2014). *Metode Riset Online: Teori, Praktik, dan Pembuatan Aplikasi Menggunakan HTML, PHP, dan CSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tafsir. (2017). *Memasuki 100 tahun ke-2, Tafsir Ajak Bangun Kekuatan Ekonomi*. 01 Juli 2017. www.kabarduabelas.com.
- Widayati (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Wulandari, Ranti. (2017). *Implementasi Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Internasional*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Program Studi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Zuhdi, Najmuddin & Na'imah, Elvi. (2013). *Studi Islam 2*. Cet. ke-dua. Surakarta. LPIK.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Kisi-kisi Penelitian

A. Gambaran Umum Bank Syariah

No	Sub Materi	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
Gambaran Umum Bank Syariah				
1	Manfaat pengetahuan Literasi Perbankan Syariah	Pengetahuan tentang Perbankan syariah dapat membantu Anda dalam menentukan produk dan layanan jasa yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda	Benar	Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat besar, seperti: mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan; memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan baik; terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (www.ojk.go.id).
2	Pengertian Bank Syariah	Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam	Benar	Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal (PPSK Bank Indonesia, 2005: 4).
3	Prinsip dasar bank syariah	Prinsip Bank Syariah adalah mengandung gharar, maysir, riba,	Salah	Secara singkat prinsip dasar bank syariah biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil) dan

		zalim dan obyek yang haram		hanya membiayai usaha yang halal (PPSK Bank Indonesia, 2005: 4).
4	Pelarangan Riba, Maysir, dan Gharar	Pelarangan Riba dimaksudkan untuk mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan	Salah	Dengan dilarangnya riba dan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, pelarangan gharar dimaksudkan untuk mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan (PPSK Bank Indonesia, 2005: 11).
5	Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional	Dalam bank konvensional dan bank syariah, uang adalah komoditi, yaitu dapat diperjualbelikan dengan mata uang lain	Salah	Pada dasarnya, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (<i>money demand for transaction</i>), bukan untuk spekulasi atau <i>trading</i> . (OJK dan Menristekdikti, 2016: 12)
6	Fungsi Bank Syariah	Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS)	Benar	Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (<i>tamwil</i>) dan badan sosial (<i>maal</i>). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran <i>qardhul hasan</i>

				(PPSK Bank Indonesia, 2005: 13-14).
7	Kegiatan Usaha	Jenis kegiatan usaha bank syariah dibagi menjadi 2 yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.	Salah	Secara garis besar jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial (PPSK Bank Indonesia, 2005: 15).
8	Kegiatan Sosial	Pinjaman Qardhul hasan merupakan pinjaman lunak tanpa imbalan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial	Benar	Pinjaman Qardhul hasan merupakan pinjaman lunak tanpa imbalan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 32)
9	Konsep Operasional Bank Syariah	Keseluruhan pendapatan bank syariah akan dibagikan antara bank syariah dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kebijakan bank syariah berdasarkan kondisi perekomonian global	Salah	Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal (PPSK Bank Indonesia, 2005: 39).

B. Penghimpunan Bank Syariah

No	Sub Materi	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
Penghimpunan Dana Bank Syariah				
10	Giro <i>Wadi'ah</i>	Simpanan Giro <i>Wadi'ah</i> tidak dapat ditarik dananya sewaktu-waktu.	Salah	Nasabah penyimpan Giro <i>Wadi'ah</i> diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, dll. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 17)
11	Giro <i>Wadi'ah</i>	Bank syariah wajib memberikan bagi hasil kepada nasabah Giro <i>Wadi'ah</i>	Salah	Pada kasus kedua, Giro <i>Wadi'ah</i> tidak diberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggungjawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 18)
12	Tabungan <i>Wadi'ah</i>	Besarnya bagi hasil Tabungan <i>Wadi'ah</i> dipersyaratkan dan ditetapkan dimuka oleh pihak bank.	Salah	Ketentuan umum tabungan <i>wadi'ah</i> , tidak ada imbalan yang dipersyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>'athoya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank. (Ahmad dahlan, 2012: 144)
13	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan haji merupakan bentuk produk tabungan <i>Mudharabah</i>	Benar	Tabungan <i>Mudharabah</i> dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, dll. (Ahmad Dahlan, 2012: 146)

14	Deposito	Deposito yang Anda miliki di bank dapat diambil sewaktu-waktu	Salah	UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 7 tentang Perbankan menjelaskan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank
15	Deposito/ Investasi Umum (tidak terikat)	Deposito <i>Mudharabah al-Muthlaqah</i> (Investasi Umum) pihak bank sebagai <i>Mudharib</i> (<i>pengelola modal</i>) dan nasabah sebagai <i>Shahibul Maal</i> (<i>penyedia modal</i>), apabila bank syariah menghasilkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi bersama, tetapi apabila mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, maka kerugian ditanggung bersama oleh nasabah dan bank	Salah	Deposito <i>Mudharabah al-Muthlaqah</i> , bank sebagai <i>Mudharib</i> mempunyai kebebasan mutlak dalam mengelola investasinya. Apabila bank menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai <i>Shahibul Maal</i> . (OJK dan Menristekdikti, 2016: 19)
16	Deposito/ Investasi Khusus (terikat)	Deposito <i>Mudharabah al-Muqayyadah</i> (Investasi Khusus) pihak nasabah dapat menetapkan persyaratan tertentu, misalnya dana digunakan untuk bisnis tertentu atau proyek	Benar	Deposito <i>Mudharabah al-Muqayyadah</i> , bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 19)

		investasi tertentu sesuai yang diinginkan nasabah		
17	Obligasi/ Sukuk <i>Mudharabah</i>	Akad <i>Mudharabah</i> dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah.	Benar	Akad <i>Mudharabah</i> dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 19)
18	Obligasi/ Sukuk <i>Ijarah</i>	Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang	Benar	Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan berjangka panjang. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 20)

C. Pembiayaan Bank Syariah

No	Sub Materi	Pertanyaan	Jawaban	Sumber
Pembiayaan Bank Syariah				
19	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Dengan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , maka pihak bank syariah tidak berhak melakukan pengawasan maupun mencampuri urusan pekerjaan atau usaha pihak nasabah.	Salah	Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha pihak nasabah. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 22)
20	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i> , pihak bank syariah sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai penyedia usaha atau manajemen (pengelola).	Salah	<i>Musyarakah</i> adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana/modal (Ahmad Dahlan 2012: 169)
21	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	Pembiayaan dalam bentuk <i>Ijarah</i> yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.	Salah	Pembiayaan dalam bentuk <i>Ijarah</i> yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. (Ahmad Dahlan, 2012: 180)
22	Pembiayaan <i>Ijarah muntahiyah bit tamlik</i>	Dengan akad ini (<i>Ijarah muntahiyah bit tamlik</i>) bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga	Benar	Dengan akad ini (<i>Ijarah muntahiyah bit tamlik</i>) bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 25)

		yang disepakati di awal akad.		
23	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> , bank syariah membelikan barang/ aset yang dibutuhkan nasabah dari <i>Supplier</i> , kemudian menjualnya kembali kepada nasabah.	Benar	Dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> , bank syariah memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari <i>Supplier</i> kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 25)
24	Pembiayaan <i>Salam</i>	Pembiayaan <i>Salam</i> di bank syariah diperuntukkan pada pembiayaan pertanian jangka pendek.	Benar	Pembiayaan <i>Salam</i> di bank syariah diperuntukkan pada pembiayaan pertanian jangka pendek. (Ahmad dahlan, 2012: 195)
25	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan <i>Istishna'</i> dipraktikkan untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek.	Benar	Pembiayaan <i>Istishna'</i> dipraktikkan untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. (Ahmad dahlan, 2012: 196)
26	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad pembiayaan <i>Istishna'</i> ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh pihak bank dan nasabah.	Salah	Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad pembiayaan <i>Istishna'</i> ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. (OJK dan Menristekdikti, 2016: 24)

LAMPIRAN 2

A. Struktur PW IPM Jawa Tengah 2017-2019



**PIMPINAN PUSAT
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
No. 014-SK/PP IPM-098/2017

**TENTANG
PENGESAHAN STRUKTUR PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2019**

- Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah setelah :
- Memperhatikan** : Surat Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah Nomor A.1-XI/PW IPM-014/2017 tentang Permohonan Surat Keputusan.
- Menimbang** : 1. Pimpinan Wilayah adalah wakil Pimpinan Pusat yang memimpin dan melaksanakan tugas di wilayahnya.
2. Hasil Musyawarah Wilayah XXII Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah tentang struktur Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah adalah tidak bertentangan dengan kaidah organisasi.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar IPM pasal 16;
2. Anggaran Rumah Tangga IPM pasal 16, 22, dan 23;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengesahkan Struktur Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019 sebagai berikut :

Ketua Umum	: Ahmad Basyirudin
Ketua Organisasi	: Affan Wazar Ahmad
Ketua Perkaderan	: Puput Pertiwi
Ketua Kajian Dakwah Islam	: Taufiq Al Muhajirin
Ketua Pengkajian Ilmu Pengetahuan	: Rifky Solihatun
Ketua Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga	: Muhammad Iqbal
Ketua Advokasi	: Rizki Yakaria Novandi
Ketua Kewirausahaan	: Muhammad Nurul Huda

Sekretaris Umum	: Monica Subastia
Sekretaris Organisasi	: Fajar Mustofa
Sekretaris Perkaderan	: Aina Sofi Nastiti
Sekretaris Kajian Dakwah Islam	: Ibrahim Nasir
Sekretaris Pengkajian Ilmu Pengetahuan	: Sulaiman Fahmi
Sekretaris Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga	: Dea Aldi Alfian

Jl. Menteng Raya No. 62 Jl. KHA. Dahlan No. 103
Jakarta Pusat 10340 Yogyakarta 55262
Telp. / Fak : +62213103940 Telp. / Fak : +62274 411293
email : sekretariat@ipm.or.id / website : www.ipm.or.id

Sekretaris Advokasi	: Supriyadik
Sekretaris Kewirausahaan	: Moch. Zainudin Qomari
Bendahara Umum	: Rahman Wibowo
Bendahara I	: Laili Sholikhah
Anggota Organisasi	: Agam Setyo Bakti Tursiti
Anggota Perkaderan	: M. Riskiyanto M. Arif Nurfaudin
Anggota Kajian Dakwah Islam	: Ulfa Isnaini
Anggota Pengkajian Ilmu Pengetahuan	: Sulistyو Suharto
Anggota Apresiasi Seni Budaya dan Olahraga	: Zaki Hamam Arsyad Luthfi Nur Hidayanti
Anggota Advokasi	: Ida Nafila Ismah Fadiah
Anggota Kewirausahaan	: M. Arif Sitegar

- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan diselenggarakan Permusyawaratan berikutnya dan terpilihnya pimpinan yang baru.
- Ketiga** : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah akan meninjau kembali.

Nuun Wal Qolami Wamaa Yasthuruun

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 05 Sya'ban 1438 H

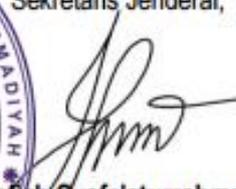
Bertepatan tanggal : 02 Mei 2017 M

Ketua Umum,



Velandani Prakoso
NBA : 00.00.18748

Sekretaris Jenderal,

Hafizh Syafa'atullahman
NBA : 00.00.41132

B. Lembaga Informasi Media PW IPM Jawa Tengah 2017-2019



**PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
No.003-KEP/B.1-XI/PW.IPM-004/2018

TENTANG :
LEMBAGA INFORMASI MEDIA (LIM)
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2019

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, setelah :

- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rencana Strategis Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 201-2019 bahwa perlunya dibentuk Lembaga Informasi Media (LIM)
- MENIMBANG** : 1. Telah terbentuknya LIM IPM Jawa Tengah.
2. Bahwa segala keputusan harus disahkan dalam surat keputusan
- MENINGGAT** : 1. Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pasal 26
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pasal 28

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan Lembaga Informasi Media (LIM) Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah (Ahmad Basyiruddin)

Koordinator : Santoso

Divisi Media Sosial : Ayuning Intan Anugrah Utami

Divisi Fotografi : Agustina Nur Firmawati

Divisi Desain : Zamghoni Mukhotob

Divisi Berita : Ahmad Rizal Laffi

Divisi Website : Muhammad Habiburrahman

Divisi Video : Nurul Jidan Ismail

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga permusyawaratan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah berikutnya.
3. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah akan meninjau kembali.

Nuun Wal Qolami Wamaa Yasthuruun

C. Korps Fasilitator PW IPM Jawa Tengah 2017-2019



**PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KEPUTUSAN
No.045-KEP/B.1-XI/PW.IPM-143/2017**

**TENTANG :
PENGESAHAN
KORPS FASILITATOR
PIMPINAN WILAYAH IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH
JAWA TENGAH
PERIODE 2017-2019**

Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah, setelah :

- MEMPERHATIKAN** : Hasil Follow Up Pelatihan Fasilitator Pendamping 2 dan Rapat Pimpinan Pimpinan Wilayah Iktan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah
- MENIMBANG** : 1. Telah terbentuknya Korps Fasilitator.
2. Bahwa segala keputusan harus disahkan dalam surat keputusan
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pasal 26
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pasal 28
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1 Mengesahkan Korps Fasilitator Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah periode 2017-2019 dengan susunan personalia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Ahmad Basyirudin
Pengarah	: Puput Pertiwi Bidang Perkaderan
Koordinator	: Ainur Rosyid Adzikkri
Sekretaris	: Eka Faridah Wahyuningtyas
Koordinator Karesidenan Pati	: Marina Melani
Koordinator Karesidenan Semarang	: Siti Arizki Sulistyani
Koordinator Karesidenan Kedu	: Andrian
Koordinator Karesidenan Pekalongan	: Eka Faridah Wahyuningtyas
Koordinator Karesidenan Solo	: Satrio Wibowo
Koordinator Karesidenan Banyumas	: Metanisa Rofi Hamtina

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga ditetapkan dan diputuskannya struktur korps Fasilitator yang baru.
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah akan meninjau kembali.

Nuun Wal Qolami Wamaa Yasthuruun

LAMPIRAN 3

Data Responden Tingkat Literasi Perbankan Syariah

Pengurus PW IPM Jawa Tengah

No	Responden	Gender	Usia	Pendidikan
1	Ahmad Basyiruddin	L	> 22 Tahun	PT
2	Affan Wazzar Ahmad	L	> 22 Tahun	PT
3	Puput Pertiwi	P	> 22 Tahun	PT
4	Taufiq Al Muhajirin	L	> 22 Tahun	PT
5	Rifky Solihatun	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
6	Muhammad Iqbal	L	> 22 Tahun	PT
7	Rizki Yakaria Novandi	L	> 22 Tahun	PT
8	Monica Subastia	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
9	Fajar Mustofa	L	> 22 Tahun	PT
10	Aina Sofi Nastiti	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
11	Ibrahim Nasir	L	> 22 Tahun	PT
12	Sulaiman Fahmi	L	> 22 Tahun	PT
13	Dea Aldi Alfian	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
14	Supriyadik	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
15	Moch. Zainuddin Qomari	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
16	Rahman Wibowo	L	> 22 Tahun	SLTA
17	Laili Sholikhah	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
18	Agam Setyo Bakti	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
19	Tursiti	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
20	M. Riskiyanto	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
21	M. Arif Nur Faudin	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
22	Ulfa Isnaini	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
23	Sulistyo Suharto	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
24	Zaki Hamam Arsyad	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
25	Luthfi Nur Hidayanti	P	> 22 Tahun	PT
26	Ida Nafila	P	> 22 Tahun	PT
27	Ishmah Fadiah	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
28	M. Arief Sitegar	L	> 22 Tahun	PT
29	Santoso	L	> 22 Tahun	PT
30	Ayuning Intan A. U.	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
31	Agustina Nur F.	P	< 19 Tahun	SLTA
32	Zamghoni Mukhotob	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
33	Ahmad Rizal Lafif	L	> 22 Tahun	PT

34	Muhammad Habiburrahman	L	< 19 Tahun	SLTA
35	Nurul Jidan Ismail	L	< 19 Tahun	SLTA
36	Ainur Rosyid Adzikkri	L	19 Tahun - 22 Tahun	PT
37	Eka Faridah Wahyuningtyas	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
38	Marina Melani	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
39	Siti Arizki Sulistyani	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT
40	Andrian	L	19 Tahun - 22 Tahun	SLTA
41	Metanisa Rofi Hamtina	P	19 Tahun - 22 Tahun	PT

LAMPIRAN 4

Data Literasi Perbankan Syariah

Res	Literasi Perbankan Syariah																										Skor	Kat	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	61,54	2	
2	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	73,08	2	
3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	50	1	
4	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	76,92	2	
5	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	42,31	1	
6	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	57,69	1	
7	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	61,54	2	
8	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	65,38	2	
9	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	69,23	2	
10	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	69,23	2	
11	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	73,08	2	
12	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	69,23	2	
13	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	73,08	2	
14	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	50	1	
15	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	61,54	2	
16	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	57,69	1	
17	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	57,69	1	
18	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	53,85	1	
19	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	61,54	2	
20	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	53,85	1	
21	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	42,31	1
22	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	61,54	2	
23	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	50	1	
24	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	57,69	1	
25	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	69,23	2	
26	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	84,62	3	
27	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	57,69	1	
28	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	84,62	3	
29	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	50	1	
30	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	42,31	1	
31	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	30,77	1	
32	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	53,85	1	
33	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	61,54	2	
34	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	69,23	2	
35	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	30,77	1	
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	65,38	2	
37	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	42,31	1	
38	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	53,85	1	
39	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	30,77	1	
40	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	69,23	2	
41	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	57,69	1	

Kategori Tingkat Literasi

1. < 60% = Rendah
2. 60%-79% = Sedang
3. > 80% = Tinggi

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Nurul Huda
TTL : Boyolali, 09 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kedokan RT 21/RW 04, Klego, Klego, Boyolali
Agama : Islam
Hobby : Olahraga

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kedokan
SD : MIN Kedokan
SLTP : MTs Muhammadiyah 07 Klego
SLTA : SMA Muhammadiyah 04 Andong
Perguruan Tinggi : IAIN Surakarta

RIWAYAT ORGANISASI

1. DEMA IAIN Surakarta 2016
2. HMJ Perbankan Syariah IAIN Surakarta 2017
3. PC IMM Kota Surakarta 2016-2017
4. PW IPM Jawa Tengah 2017-2019
5. DPD KNPI Boyolali 2017-2020